

**PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* (GG) DAN
KEMAMPUAN SUMBERDAYA MANUSIA TERHADAP
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Padang)**



Oleh :

FITRIA NINGSIH
57694 / 2010

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL
PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DAN KEMAMPUAN
SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang)

Oleh :
Fitria Ningsih
57694/2010

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode
September 2013 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, Agustus 2013

Pembimbing I



Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak
NIP. 19580519 199001 1 001

Pembimbing II



Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak
NIP. 19801019 200604 2 002

PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

(Studi Empiris pada SKPD di Kota Padang)

Fitria Ningsih

Dr.H.Efrizzal Syofyan SE,MSi,AK

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang

Email : fitria_acc2223@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji 1) pengaruh penerapan *good governance* terhadap pelaksanaan otonomi daerah, dan 2) pengaruh kemampuan sumber daya manusia terhadap pelaksanaan otonomi daerah pada pemerintahan Kota Padang. Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah staf akuntansi pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara *simple random sampling*, dengan menggunakan rumus Slovin. Maka didapat responden sebanyak 63 orang responden. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan *Statistical Package For Social Science* (SPSS). Kesimpulan penelitian menunjukkan: 1) penerapan *good governance* berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan otonomi daerah dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,282 > 2,001$ (sig $0,005 < \alpha 0,05$) yang berarti H_1 diterima, dan 2) kemampuan sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan otonomi daerah $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $6,408 > 2,001$ (sig $0,001 > \alpha 0,05$) yang berarti H_2 diterima. Saran dalam penelitian ini adalah: 1) Bagi instansi pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai prinsip-prinsip *good governance* dan kemampuan sumber daya manusia dalam pelaksanaan otonomi daerah agar pelaksanaan otonomi daerah dapat dapat terlaksana dengan semakin baik. 2) untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap pelaksanaan otonomi daerah, dapat disertai dengan penelitian kualitatif dan pergantian sampel penelitian, serta dilakukan perubahan dalam pemilihan alternatif jawaban pada kuesioner penelitian.

Kata Kunci : Penerapan *Good Governance*, Kemampuan Sumber Daya Manusia, Otonomi Daerah.

Abstract

This study aims to examine 1) the effect of the implementation of good governance exercising regional autonomy, and 2) the influence of human resource capacity for the implementation of regional autonomy in the administration of Padang. This study is classified as a type of research that is causative. The population in this study is the accounting staff at all Regional Working Units (SKPD) Padang. This study uses a sampling technique is simple random sampling, using the formula Slovin. The importance of the respondents were 63 respondents. Data were collected by distributing questionnaires to the respondents directly concerned. The data analysis technique used is multiple regression with the help of Statistical Package For Social Science (SPSS). Conclusion The study shows: 1) the application of good governance has a positive significant effect on the implementation of the regional otonomi $t_{count} > t_{table}$ is $2.282 > 2.001$ (sig $0.005 < \alpha 0.05$) which means that H_1 is accepted, and 2) the ability of human resources has a positive significant effect the implementation of regional autonomy $t_{count} > t_{table}$ is $6.408 > 2.001$ (sig $0.001 > \alpha 0.05$) which means that H_2 is accepted. Suggestions in this study were: 1) For government agencies should conduct a review of the principles of good governance and human resource capacity in the implementation of regional autonomy for the implementation of regional autonomy can be done with the better. 2) further research can be done to change variables to find other variables that strongly affected the implementation of regional autonomy, can be accompanied by a qualitative research study sample and turnover, as well as be a change in the selection of alternative answers on a questionnaire study.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Dengan demikian daerah memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengelola daerahnya secara bertanggung jawab. Dalam arti bahwa berbagai program yang dijalankan atau dilaksanakan daerah diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah tersebut agar tidak mengalami defisit fiskal.

Pada sisi lain berjalannya otonomi daerah seluas-luasnya bagi daerah dalam membiayai daerah, memberikan peluang untuk menggali potensi daerah melalui pemungutan pajak dan restribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah kedalam penetapan kebijakan perda. Pelaksanaan otonomi daerah berarti implementasi dan penerapan kewenangan oleh pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Terdapat beberapa indikator dalam mengukur pelaksanaan otonomi yaitu dengan meninjau aspek kewenangan pemerintah daerah dengan DPRD, Pengawasan, dan pembinaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, masalah birokrasi, desentralisasi fiskal dan pelayanan publik (Bastian:2006). Dari beberapa indikator ini akan tergambar sejauhmana pelaksanaan otonomi daerah sudah terealisasi di daerah. Diharapkan otonomi, semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintah dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah yang dimilikinya.

Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah di harapkan masing-masing daerah mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Begitu pula

dengan keuangan daerah tersebut, dengan adanya otonomi daerah diharapkan daerah dapat mencapai suatu kemandirian keuangan daerah.

Kemandirian daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh oleh pemkab/pemkot. Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, secara jelas juga menyatakan bahwa terjadinya peningkatan PAD di daerah merupakan indikasi tercapainya tujuan pelaksanaan otonomi di daerah, karena dalam daerah Kabupaten/Kota tidak ada lagi wilayah administrative tetapi pelaksanaan otonomi yang luas dan utuh, Era otonomi daerah yang secara resmi dimulai diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan lain yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah merupakan desentralisasi sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Pemberian otonomi daerah haruslah didasarkan kepada faktor-faktor yang dapat menjamin daerah yang bersangkutan mampu mengurus rumah tangganya. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah merupakan desentralisasi sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Pemberian otonomi kepada daerah haruslah didasarkan kepada faktor-faktor yang dapat menjamin daerah yang bersangkutan mampu mengurus rumah tangganya.

Adapun fenomena yang terkait dengan otonomi daerah di Kota Padang adalah masih sangat kecilnya Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dibandingkan dengan Dana Perimbangan yang diterima oleh kota padang, ini terlihat dari tahun 2008 sampai tahun 2011 *Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang*

Dari data dapat dilihat masih sangat besar jumlah dana perimbangan yang diterima kota padang jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dimana seharusnya bantuan dana dari pemerintahan pusat dan pemerintahan provinsi perlu untuk diminimalkan, untuk mewujudkan kemandirian daerah otonomi. Ini menunjukkan belum optimalnya pemerintah kota padang dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip demokratis dengan memberikan wewenang yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan pengaturan, pembagian, penggalan dan pemanfaatan sumber daya yang berkeadilan serta pengaturan perimbangan keuangan daerah, untuk dapat melaksanakan semua itu diperlukan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Kemampuan Sumber Daya Manusia dari Aparatur Pemerintah, sehingga pelaksanaan otonomi daerah yang tidak hanya berfokus kepada dana bantuan dari pusat dalam bentuk dana perimbangan saja. Lebih penting dari itu adalah bagaimana kemampuan daerah untuk memanfaatkan dan mendayagunakan, serta mengelola potensi-potensi yang ada di daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan pembangunan daerah dapat terwujud.

Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen publik. Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintah di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya.

secara konseptual pengertian *good governance* (baik) dalam istilah *good governance* (kepemerintahan yang baik), mengandung dua pemahaman, pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Kemampuan Sumber Daya Manusia dan kemampuan keuangan/ekonomi, merupakan faktor

pendukung dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pentingnya posisi sumber daya manusia pelaksana ini karena merupakan unsur dinamis dalam pemerintahan yang bertindak sebagai penggerak roda organisasi pemerintah, untuk itu perlunya aparatur yang kompeten dan berkualitas.

Sumber daya manusia merupakan hal yang terpenting yang harus dilihat dalam sebuah instansi. Untuk meningkatkan SDM maka harus diadakan pembinaan. Pembinaan sumber daya manusia bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang disiplin, profesional, berkualitas tinggi, produktif untuk mendapatkan hasil kerja yang efektif dan efisien.

Dalam mensukseskan pembangunan dibutuhkan aparatur yang berpengetahuan tinggi, keterampilan tinggi, dan kemauan tinggi, dalam menjalankan tugas-tuganya untuk meningkatkan pelayanan publik maupun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan daerah. (Josep:2006). Berhasil tidaknya pelaksanaan otonomi daerah sebagian besar bergantung pada Pemerintahan Daerah itu sendiri yang didukung oleh Aparatur atau alat-alat perlengkapan Daerah lainnya yaitu Para Pegawai/Aparatur Daerah itu sendiri.

Penyelenggaraan otonomi Daerah yang sehat dapat diwujudkan pertama-tama dan terutama oleh kapasitas yang dimiliki oleh manusia pelaksanaanya (Aparatur Pemerintah). Penyelenggaraan otonomi Daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila manusia pelaksanaanya baik, dalam arti mentalitas maupun kapasitasnya.

Pentingnya posisi manusia pelaksana ini karena manusia merupakan unsur dinamis dalam organisasi yang bertindak sebagai penggerak roda organisasi pemerintahan. Kemampuan Keuangan/Ekonomi, juga merupakan indikator yang tidak kalah penting, Tanpa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan daerah jelas tidak mungkin dapat ditingkatkan. sementara itu dengan pendapatan yang memadai, kemampuan daerah untuk menyelenggarakan otonomi akan meningkat. Dengan Aparatur Pemerintah yang berkualitas, daerah akan mampu untuk membuka peluang-peluang potensi ekonomi yang terdapat pada daerah tersebut. Pengembangan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut, apabila dikelola

dengan secara optimal dapat menunjang pembangunan daerah dan mewujudkan otonomi. Kemampuan daerah untuk membiayai diri sendiri akan terus meningkat.

Gambaran citra kemandirian daerah dalam berotonomi daerah dapat diketahui dari seberapa besar kemampuan dari pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat daerah. Usaha penciptaan kemandirian daerah sebagai tujuan dari otonomi daerah, dapat dilakukan dengan cara beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik. Selain itu perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Gambaran dari kemampuan keuangan pemerintahan daerah yang semakin kuat, ditentukan dari seberapa besar penerimaan pemerintahan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Bantuan dari pemerintahan pusat dan pemerintahan provinsi perlu untuk diminimalkan, untuk mewujudkan kemandirian daerah otonomi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana pelaksanaan otonomi daerah pada pemerintah Kota Padang serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah. faktor-faktor ini terdiri dari penerapan *good governance* dan kemampuan sumber daya manusia.

TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN MASALAH

Pelaksanaan Otonomi Daerah

Otonomi daerah menurut Bastian (2006:338) adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan pengertian di atas, otonomi daerah secara lebih luas lagi merupakan wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah untuk mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari bidang ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya. Namun

kewenangan dalam era otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu seperti: politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama karena bidang-bidang tersebut menjadi urusan pemerintah pusat.

Aspek-aspek Pelaksanaan otonomi daerah menurut Bastian (206:350) adalah:

1. Aspek kewenangan
2. Dinamika hubungan antara Kepala Daerah dengan DPRD
3. Aspek pengawasan dan pembinaan
4. Birokrasi era otonomi daerah
5. Desentralisasi fiskal dan pelayanan publik

Tujuan program otonomi daerah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antardaerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing.

Penerapan *Good Governance*

Menurut Salam (2004:225) menyatakan:

"*governance* merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses, dan institusi-institusi melalui warga Negara mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka, serta menggunakan hak dan kewajiban mereka. *Governance* merupakan proses lembaga-lembaga publik mengatasi masalah-masalah publik, mengelolakan sumber daya publik dan menjamin realisasi hak asasi manusia. Dalam konteks ini, *good governance* memiliki hakekat yang esensial yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak berlandaskan pada pemerintahan hukum".

Dalam Mardiasmo (2002:17) *Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *United National Development Program (UNDP)* memberikan pengertian *good governance* sebagai berikut "*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels*". Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *UNDP* lebih menekankan aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengolaan urusan-urusan negara pada semua tingkat. *Political governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policy/strategy formulation*). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan dibidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

Merujuk pada konsepsi tersebut, *good governance* memiliki beberapa atribut kunci seperti efektif, partisipatif, transparan, akuntabel, produktif, dan sejajar serta mampu mempromosikan penegakan hukum. Di atas semua itu, atribut utama *good governance* adalah bagaimana penggunaan kekuasaan dan otoritas dalam penyelesaian berbagai persoalan publik.

Sementara itu *World Bank* Dalam Mardiasmo (2002:18) memberikan definisi *good governance* sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. *World Bank* mendefinisikan *good governance* adalah:

“sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha”.

Dalam hal ini *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah, mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat.

Jika mengacu pada program *World Bank* dan *UNDP*, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Kata baik di sini maksudnya mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan karakteristik dasar *good governance*.

Menurut *UNDP* dalam Mardiasmo (2002:18) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi:

1. Partisipasi (*Participation*)
Setiap orang atau setiap warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berasosiasi dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.
2. Aturan Hukum (*Rule of Law*)
 - a. Supermasi hukum: di samping erat kaitannya dengan *rule of law* juga mengisyaratkan adanya jaminan bahwa suatu masalah diatur secara jelas, tegas dan tidak duplikatif, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - b. Hukum yang responsif: hukum harus mampu menyerap aspirasi masyarakat luas dan mampu mengakomodasikan kebutuhan masyarakat dan bukan dibuat untuk kepentingan segelintir elit.
 - c. Penegakan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif: upaya yang mempersyaratkan adanya sanksi, mekanisme untuk menjalankan sanksi, serta sumber daya manusia/ penegak hukum yang memiliki integritas.
 - d. Independensi peradilan: yakni prinsip yang meletakkan efektifitas peradilan sebagai syarat penting perwujudan *rule of law*.
3. Transparansi (*Transparency*)
Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Berbagai proses, kelembagaan, dan informasi baru harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya, dan informasinya harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat *monitoring* dan evaluasi.
4. Daya Tanggap (*Responsiveness*)
 - a. Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat.

- b. Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan pengaduan.
 - c. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
 - d. Tumbuhnya kesadaran masyarakat.
 - e. Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan berkurangnya jumlah pengaduan.
5. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)
 Dalam hubungan yang saling melengkapi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, pemerintah bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
6. Berkeadilan (*Equity*)
 Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya serta memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)
- a. Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal.
 - b. Adanya perbaikan yang berkelanjutan.
 - c. Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja.
 - d. Meningkatkan kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat.
 - e. Berkurangnya penyimpangan pembelanjaan.
 - f. Berkurangnya biaya operasional pelayanan.
 - g. Prospek memperoleh standar ISO pelayanan.
8. Akuntabilitas (*Accountability*)
 Para pengambil keputusan dalam organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas)

kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholders*). Pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda, bergantung apakah jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau external. Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.

9. Bervisi Strategis (*Strategic Vision*)

Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan manusia (*human development*), bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Mereka juga memahami aspek-aspek historis, kultural, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka.

Kemampuan Sumber Daya Manusia

Secara umum Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi, sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Manusia pelaksana dalam pemerintahan harus baik, ini merupakan faktor esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pentingnya faktor ini karena manusia merupakan subjek dalam setiap aktivitas pemerintahan.

Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi, potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Keberadaan Sumber Daya Manusia yang tepat secara kuantitas, sangat dibutuhkan dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sebagaimana dinyatakan oleh Joseph Riwukaho (1988), sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi otonomi daerah.

Dalam wacana tentang desentralisasi, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi sumber daya manusia personalis faktor determinan yang harus tersedia dan melekat dalam pelaksanaan pemerintahan terlaksananya otonomi daerah.

Menurut Susilo (2002:3) “Sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus

penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuannya". Manusia merupakan bagian dari sumber daya yang dibutuhkan organisasi/ perusahaan. Namun pelaksanaannya, kebijakan manajemen masih banyak yang belum memperhatikan peran sumber daya manusia (SDM). Dalam hal ini dua hal yang diperhatikan dalam sumber daya manusia, yaitu :

a. Persaingan dalam sumber daya manusia

Adalah persaingan dalam kualitas sumber daya manusia dari setiap organisasi, baik dalam bentuk perusahaan ataupun lainnya. Kualitas sumber daya manusia ini diukur dari kemampuan pengetahuannya. Pengetahuan disini dimaksud dalam arti luas yaitu kemampuan SDM yang tercermin dari kinerjanya dan terlihat dari prilakunya yang kompeten, cepat dan inovatif serta dorongan yang kuat untuk belajar.

Nilai-nilai dalam sumber daya manusia adalah jumlah dari sumber daya manusia pada sebuah organisasi dan dapat juga disebut sebagai model intelektual dari orang-orang dalam organisasi, kemampuan yang mereka miliki, dan menggungkannya dalam pekerjaan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam peningkatan sumber daya manusia adalah dengan menggunakan semua bakat yang dimiliki sumber daya manusia yang ada dalam organisasi dan mengambil yang terbaik dari populasi bervariasi diluar organisasi mereka.

b. Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Stoner (2002:20) "manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan jabatan yang yang tepat pada saat organisasi memerlukannya". Tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah menetapkan kebijakan organisasi untuk dapat meningkatkan kontribusi atau peranan lain. Adapun proses manajemen sumber daya manusia antara lain :

- Perencanaan sumber daya manusia,
- 1) Sosialisasi atau orientasinya,
 - 2) Pelatihan dan pengembangan,

- 3) Sosialisasi atau orientasinya,
- 4) pelatihan dan pengembangan,
- 5) Penilaian prestasi.

c. Manusia Pelaksana

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan otonomi daerah sebagian besar tergantung manusia pelaksanaannya/sumber daya manusia, sumber daya manusia pelaksana pada pemerintahan daerah itu sendiri.

Penelitian Terdahulu

Aswin (2010) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan keuangan kota Salatiga dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, hasil penelitian ini membuktikan terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara kemampuan keuangan terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

Voni (2010) pengaruh pelaksanaan otonomi daerah dan optimalisasi pengelolaan pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota padang, dalam penelitian ini pelaksanaan otonomi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli kota padang.

Yulianda (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah dan komitmen aparat terhadap kinerja pemerintah daerah, dari hasil penelitian yang dilakukan yulianda pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh signifikan positif terhadap komitmen aparat kinerja pemerintah.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan di atas dapat dijelaskan bahwa untuk mendukung terlaksananya otonomi daerah , penerapan *good governance* haruslah baik, dan sumber daya manusia yang memadai di pemerintah Kota Padang.

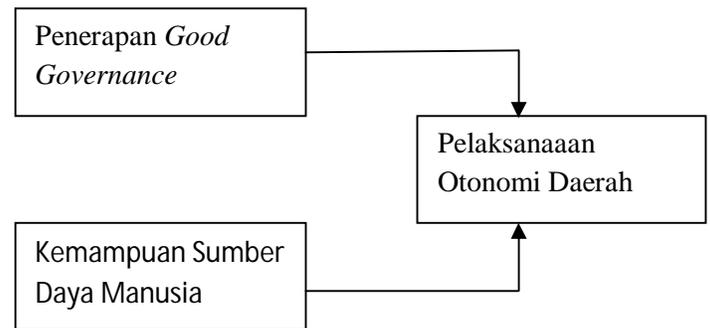
Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah merupakan desentralisasi sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan menjadi urusan rumah

tangganya sendiri. Pemberian otonomi kepada daerah haruslah didasarkan kepada faktor-faktor yang dapat menjamin daerah yang bersangkutan mampu mengurus rumah tangganya. Diantara faktor-faktor tersebut yang mendukung terselenggaranya otonomi daerah diantaranya adalah kemampuan sumber daya manusia yang ada, serta ketersediaan sumber daya alam dan peluang ekonomi daerah tersebut.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan dukungan pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga dapat tercapainya pelaksanaan otonomi dalam rangka kemandirian yang ditunjukkan oleh pendapatan asli daerah yang dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah berkaitan dengan desentralisasi dan otonom sistem yang demokratis adalah syarat mutlak terlaksananya *good governance*, desentralisasi kebijakan dalam rangka *good governance* merupakan suatu keharusan dalam menjalankan pemerintahan. Jika dikaitkan dengan penerapan *good governance* dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka semakin baik penerapan *good governance* dalam pemerintahan maka semakin baik pula pelaksanaan otonomi daerah yang didukung oleh aparatur pmda yang berkualitas, dengan menempatkan orang-orang yang tepat dalam pemerintahan daerah, maka *good governance* akan terwujud.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat diwujudkan pertama-tama dan terutama ditentukan oleh kapasitas yang dimiliki oleh manusia pelaksananya. Penyelenggaraan otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila manusianya pelaksananya baik, dalam arti mental maupun kapasitasnya. Pentingnya manusia pelaksana ini karena manusia merupakan unsur dinamis dalam organisasi yang bertindak/berfungsi sebagai subjek penggerak roda organisasi pemerintahan. Oleh sebab itu, kualifikasi mentalitas dan kapasitas manusia yang kurang memadai dengan sendirinya melahirkan implikasi yang kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan otonomi daerah.



Gambar 1: Kerangka Koseptual

Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual, dapat dilakukan hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Penerapan *Good Governance* (GG) berpengaruh signifikan positif terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Padang.
- H₂ : Kemampuan Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan positif terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Padang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini tergolong pada penelitian akusatif.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Padang berjumlah 45 SKPD yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Inspektorat. Dengan menggunakan rumus *Slovin* didapat 31 sampel dengan 63 responden.

Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek. sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada populasi dalam penelitian ini.

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel yaitu :

1. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Otonomi Daerah.
2. Variabel Eksogen dalalam penelitian ini adalah :
 - a. Penerapan *Good Governance* (X₁)
 - b. Kemampuan Sumber Daya Manusia (X₂)

Pengukuran Variabel

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut, (Ghozali, 2007:45). Sebelum kuesioner dibagikan maka dilakukan uji pendahuluan. Uji pendahuluan atau *pilot test* dilakukan kepada mahasiswa Fakultas Universitas Negeri Padang, khususnya kepada mahasiswa Program Studi Akuntansi dan telah menyelesaikan perkuliahan Akuntansi Sektor Publik dan Lanjutan, Keuangan dan Daerah dan Seminar Akuntansi Sektor Publik.

Uji validitas digunakan rumus *Product Moment* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N(\sum XY) - (\sum Y)(\sum X)}{\sqrt{\{N\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

(Arikunto, 2006:170)

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien Korelasi
N = Besar sampel
x = Variabel Bebas (X₁, X₂)
y = Variabel Terikat

Jika nilai r hitung < r tabel maka nomor item tersebut tidak valid dan jika nilai r hitung > r tabel maka item tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

2. Uji Reliabilitas

Kuesioner dinyatakan *reliable* jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konstan/stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2007: 41). Untuk uji reliabilitas dapat digunakan rumus *croanbach's alpha*:

$$r = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[\frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma^2 t} \right]$$

(Arikunto, 2006:196)

Dimana:

r = Reliabilitas Instrumen

k = Banyak butir pertanyaan

$\sum \sigma_b^2$ = Jumlah varians butir

$\sigma^2 t$ = Varian total

Cara untuk mengukur reliabilitas dengan *Cronbach's Alpha* menurut Sekaran (2003:205) dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Kurang dari 0,6 tidak reliabel
- b. 0,6 – 0,7 akseptabel
- c. 0,7 – 0,8 baik
- d. Lebih dari 0,8 relaibel

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal maka dalam penelitian ini digunakan uji *statistic kolmogorov smirnov*, data yang normal adalah data yang memiliki nilai signifikansi > 0,05.

2. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi mengasumsikan tidak terjadinya *heteroskedastisitas*. Untuk mendeteksi terjadinya gejala heteroskedastisitas maka dilakukan uji *glejser*. Data yang tidak heteroskedastisitas adalah data yang nilai signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 0,05 (>5%).

3. Uji Multikolinearitas

Uji *multikolinearitas* bertujuan untuk mendeteksi apakah tidak terdapat korelasi yang tinggi antara variabel independent yang satu dengan variabel independent yang lain. Korelasi antar variabel independent ini dapat dideteksi dengan menggunakan *variabel inflation factor (VIF)*. Multikolinearitas terjadi jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10.

Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis sesuai dengan langkahlangkah berikut:

1. Analisis Deskriptif

a. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk memastikan semua pernyataan telah diisi oleh responden.

b. Menghitung Nilai Jawaban

$$\frac{5SB + 4B + 3RR + 2TB + 1STB}{15}$$

Dimana:

SB = Sangat Baik

B = Baik

RR = Ragu-Ragu

TB = Tidak Baik

STB = Sangat Tidak Baik

c. Menghitung Relevan Responden

$$\text{Mean} = \frac{\sum_{h=1}^n xi}{n}$$

Dimana:

x_i = skor Total

n = Jumlah Responden

d. Menghitung nilai TCR masing-masing kategori jawaban dari deskriptif Dengan

rumus:

$$\text{TCR} = \frac{R_s}{n} \times 100$$

Dimana:

TCR = Tingkat Capaian Responden

R_s = Rata-rata skor jawaban responden

n = Nilai skor jawaban

Nilai persentase dimasukkan ke dalam kriteria sebagai berikut:

a. Interval jawaban responden 76-100% kategori jawabannya baik.

b. Interval jawaban responden 56-75% kategori jawabannya cukup baik.

c. Interval jawaban responden <56% kategori jawabannya kurang baik.

Analisi Data

a. Analisis Regresi Berganda

Alat analisis regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

Y = Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Pemerintah Kota Padang

a = Konstanta

$b_{1,2}$ = Koefisien regresi dari variabel independen

X_1 = Penerapan GG

X_2 = Kemampuan SDM

e = *error term*

b. Uji F (F-Test)

Uji F dilakukan bertujuan untuk menguji apakah hasil analisis regresi berganda modelnya sudah *fix* atau belum dan untuk dapat mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat secara keseluruhan atau secara simultan. Patokan yang digunakan dalam pengujian ini adalah membandingkan nilai *sig* yang diperoleh dengan derajat signifikansi pada level $\alpha = 0,05$. Apabila nilai *sig* yang diperoleh lebih kecil dari derajat signifikansi maka model yang digunakan sudah *fix*. Rumus yang digunakan adalah:

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

(Gujarati, 1999:120)

Keterangan:

- F = Uji F
- R^2 = Koefisien determinan
- k = Jumlah variabel bebas
- n = Jumlah Sampel

c. Uji Hipotesis (t-Test)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Untuk melihat nilai signifikan masing-masing parameter yang diestimasi, maka digunakan *t-Test* dengan rumus :

$$t - Test = \frac{\beta_n}{S\beta_n}$$

keterangan

- t = Nilai mutlak untuk pengujian
- β_n = Koefisien regresi masing-masing variabel
- $S\beta_n$ = Standar error masing-masing variabel

Dengan kriteria pengujian :

- a) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima.
- b) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_a ditolak.

Selain kriteria tersebut, untuk melihat ada tidaknya pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat dapat ditentukan dengan melihat tingkat signifikansi dengan nilai $\alpha = 0,05$. Apabila tingkat signifikansi $< 0,05$ berarti H_a diterima dan H_0 ditolak. Sebaliknya, apabila tingkat signifikansi $> 0,05$ berarti H_a ditolak dan H_0 diterima.

d. Uji Determinasi

Untuk mengetahui kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat dilihat dari *adjusted R square*-nya, pemilihan nilai *adjusted R square* karena penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan jumlah variabel lebih dari satu. Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. *Adjusted R²* berarti R^2 sudah disesuaikan dengan derajat bebas dari masing-masing jumlah kuadrat yang tercakup di dalam perhitungan *Adjusted R²*. Untuk membandingkan dua R^2 , maka harus memperhitungkan banyaknya variabel X yang ada dalam model. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan *adjusted R²* yaitu:

$$AdjustedR^2 = 1 - \left(1 - R^2\right) \left[\frac{N - 1}{N - k}\right]$$

Dari rumus di atas jelas bahwa:

- 1 Kalau $k > 1$ maka *adjusted R²* $< R^2$, yang berarti bahwa apabila banyaknya variabel bebas ditambah, *adjusted R²* dan R^2 akan sama-sama meningkat, tetapi peningkatan *adjusted R²* lebih kecil daripada R^2 .
- 2 *Adjusted R²* dapat positif atau negatif, walaupun R^2 selalu non negatif. Jika *adjusted R²* negatif nilainya dianggap 0.

Definisi Operasional

1. *Good Governance* (GG) merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Dalam penelitian ini pengukuran *good governance* dilihat dari prinsip-prinsip *good governance* yang dijalankan oleh pemerintah daerah, yaitu akuntabilitas, responsif terhadap perubahan, transparan, berpegang teguh pada aturan hukum, mendorong adanya partisipasi pengguna jasa, mementingkan kualitas, efisiensi dan efektif, mempertimbangkan rasa keadilan bagi seluruh pengguna jasa, dan terbangunnya suatu orientasi pada nilai-nilai.
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya dalam melaksanakan tugas yang mampu mengelola dirinya sendiri serta potensi diri yang dimilikinya untuk mencapai kesejahteraan tujuan bersama agar tercapainya tujuan yang diinginkan.
3. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan implementasi dan penerapan berbagai aspek otonomi dalam urusan rumah tangga daerah sendiri. Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah maka memberi peluang daerah untuk mengambil kebijakan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerahnya, meskipun masih ada pembatasan tertentu seperti masalah perimbangan keuangan yang diatur oleh pemerintah pusat, sehingga agar dapat terlaksananya otonomi daerah sangat diperlukan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Uji Reabilitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan *Cronbach's Alpha*. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka

data dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $N=53$, adalah 0,273. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai *Corrected Item-Total Collection* untuk masing-masing item variabel X_1 , X_2 , dan Y semuanya diatas r_{tabel} . Jika dapat dikatakan bahwa seluruh item pertanyaan variabel X_1 , X_2 dan Y adalah valid.

Dari Tabel dapat dilihat nilai terkecil dari *Corrected Item-Total Collection* untuk masing-masing instrument. Untuk masing-masing instrument kemampuan sumber daya manusia diketahui nilai *Corrected Item-Total Collection* terkecil 0,300. Instrument penerapan *good governance* terkecil 0,322, dan untuk pelaksanaan otonomi daerah 0,303.

2. Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan *Cronbach's Alpha*. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $N=53$, adalah 0,273. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai *Corrected Item-Total Collection* untuk masing-masing item variabel X_1 , X_2 , dan Y semuanya diatas r_{tabel} . Jika dapat dikatakan bahwa seluruh item pertanyaan variabel X_1 , X_2 dan Y adalah valid.

Dari Tabel nilai terkecil dari *Corrected Item-Total Collection* untuk masing-masing instrument. Untuk masing-masing instrument kemampuan sumber daya manusia diketahui nilai *Corrected Item-Total Collection* terkecil 0,300. Instrument penerapan *good governance* terkecil 0,322, dan untuk pelaksanaan otonomi daerah 0,303.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Pada uji normalitas menyatakan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,475 dengan signifikan 0,982. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut, karena nilai signifikan dari uji normalitas $> 0,05$.

2. Uji Multikolinearita

Hasil nilai VIF yang diperoleh dalam Tabel di atas menunjukkan Variabel penerapan *good governance* (X_1) dan

kemampuan sumber daya manusia (X_2) dengan nilai VIF 1,220 adalah nilai VIF yang kecil dari 10, dan nilai *tolerance* adalah 0,820 > 0,1. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat toleransi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinieritas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.

3. Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai sig variabel-variabel > 0,05 (sig > 0,05), maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.

Hasil Analisis Berganda

Untuk mengungkap pengaruh variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis regresi berganda. Model regresi berganda yang digunakan terdiri dari 2 variabel bebas yaitu *good governance* (X_1), sumber daya manusia (X_2) dan satu variabel terikat yaitu pelaksanaan otonomi daerah (Y). Analisis berganda dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dan nilai sig dengan α yang diajukan yaitu 95% atau $\alpha = 0,05$. Hasil pengolahan data yang menjadi dasar dalam pembentukan model.

$$POD = 2,252 + 0,320(GG) + 0,925(SDM)$$

Uji Model

Uji F (F-Test)

Dari hasil analisis data yang diperoleh mengenai penerapan *good governance* dan kemampuan sumber daya manusia terhadap pelaksanaan otonomi daerah dapat dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan. Untuk menguji hipotesis ini, maka dilakukan uji F dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Nilai F_{tabel} pada level signifikan 0,05 adalah 2,40 Hasil pengolahan statistik analisis regresi menunjukkan nilai $F = 35,800$ yang signifikan pada level 0,000. Jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $35,800 > 2,40$ dengan nilai

signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Karena nilai signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi yang digunakan sudah *fix*, sehingga dapat digunakan untuk memperdiksi variabel-variabel penelitian. Dari hasil pengujian juga dapat disimpulkan bahwa penerapan *good governance* dan kemampuan sumber daya manusia secara bersama-sama atau secara silmutan berpengaruh signifikan terhadap Pelaksanaan otonomi daerah.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dari tampilan output SPSS *model summary* pada Tabel 21 di atas besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,572. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel penerapan *good governance*, dan kemampuan sumber daya manusia terhadap variabel terikat yaitu pelaksanaan otonomi daerah adalah sebesar 57,20%, sedangkan 42,80% ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis (t-test)

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen uraian berikut ini :

- a. Penerapan *good governance* (X_1) berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig < α 0,05. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar $0,005 < \alpha$ 0,05 dan nilai t_{hitung} 2,282 > t_{tabel} 2,011. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif yaitu 0,320. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H_1 dapat diterima. Dimana semakin baik penerapan *good governance* maka semakin baik pula pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa penerapan *good governance* (X_1) berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

- b. Kemampuan Sumber Daya Manusia (X_2) berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan otonomi daerah,

Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $< \alpha$ 0,05. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar $0,005 < \alpha$ 0,05 dan nilai t_{hitung} $6,408 > t_{tabel}$ 2,011. Nilai koefisien β dari variabel X_2 bernilai positif yaitu 0,925. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H_2 dapat diterima. Dimana semakin baik penerapan sumber daya manusia maka semakin baik pula pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa penerapan sumber daya manusia (X_2) berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

Pembahasan

1. Pengaruh Penerapan *Good Governance* terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan otonomi daerah dengan nilai $t_{tabel} = 2,282$ dan nilai signifikan 0,005. Semakin baik penerapan *good governance* maka pelaksanaan otonomi daerah juga akan semakin meningkat. Dimana pada tabel distribusi frekuensi variabel penerapan *good governance* indikator partisipasi mendapat capaian responden tertinggi yaitu sebesar 84,91% yang menunjukkan bahwa adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan akan menciptakan pemerintahan yang baik.

Dimana penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yulianda (2010) juga menunjukkan hasil yang sama bahwa *good governance* berpengaruh signifikan positif terhadap komitmen aparat kinerja pemerintah.

Penerapan *good governance* juga dipengaruhi oleh internal control pada lingkungan pemerintah pusat maupun daerah dikenal dengan SPIP. dalam PP No.60 Tahun

2008, unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal yang dipraktekkan di lingkungan pemerintah di berbagai negara. penerapan unsur ini dilaksanakan dengan maksud untuk menyatukan dan menjadikan integral dari kegiatan instansi pemerintah, yang meliputi : (1) lingkungan pengendalian, dimana Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk mendukung terhadap pelaksanaan SPI dan manajemen lingkungan yang sehat, (2) penilaian resiko, dimana pengendalian intern harus memberikan penilaian atas resiko yang dihadapi unit organisasi dari luar maupun dari dalam, dan (3) kegiatan pengendalian, untuk membantu memastikan bahwa arah pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi serta sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi suatu instansi pemerintah yang bersangkutan.

Konsep *good governance* merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh sektor publik. Pemerintah daerah dituntut lebih respon atau cepat dan tanggap. menurut Mardiasmo (2002:68) menyatakan terdapat tiga mekanisme yang dapat dilaksanakan daerah agar lebih responsif, transparan, dan akuntabel serta dapat mewujudkan *good governance* yaitu : (1) mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat, (2) memperbaiki internal rules dan mekanisme pengendalian, dan (3) membangun iklim kompetensi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta layanan.

Hal ini konsisten dengan teori yang dinyatakan oleh Salam (2004:219) bahwa pemerintahan yang baik dan bersih pada umumnya berlangsung pada masyarakat yang memiliki kontrol sosial efektif yang merupakan ciri dari masyarakat demokratis yang kekuasaan pemerintahnya terbatas dan tidak bisa bertindak sewenang-wenang terhadap negara termasuk didalamnya melakukan penyalahgunaan wewenang dan melakukan tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Penerapan *good governance* akan dapat meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah. hal ini didukung oleh pada teori *good governance* yang memiliki atribut kunci seperti efektif, partisipasi, transparansi, akuntabel, produktif, dan sejajar serta mampu menegakkan hukum dan *good governance* sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Penerapan *good governance* yang baik membuat baiknya pelaksanaan otonomi daerah. Namun pada kenyataannya masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang ditunjukkan dengan masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah kota Padang untuk membiayai belanja daerah yang terlihat dari tahun 2008 sampai 2011 yang menunjukkan kurang dari 50% Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan pemerintah Kota Padang.

Dilihat dari data frekuensi untuk variabel penerapan *good governance*, dimana tingkat pencapaian responden rata-rata baik untuk variabel penerapan *good governance* berada pada kategori baik. namun jika dilihat di lapangan belum dapat dikategorikan kurang baik, ini menunjukkan bahwa pemerintah sepenuhnya mempunyai daya tangkap yang baik dan tidak lanjut yang cepat terhadap kemauan dan pengaduan masyarakat dalam dalam pelayanan publik secara tepat, masih kurangnya penerapan dan pengelolaan sumber daya yang ekonomis, efisien dan efektif serta belum adanya visi pemerintah yang jauh kedepan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah tersenut agar tidak mengalami defisit fiskal, sehingga penerapan *good governance* dapat diterapkan sehingga penerapan *good governance* juga membantu reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen publik. Reformasi kelembagaan menyangkut

pembenahan seluruh alat-alat pemerintah di daerah baik struktur maupun infrastruktur.

2. Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Hipotesis kedua penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan otonomi daerah oleh pemerintah dengan nilai $t = 6,408$ dan nilai signifikan $0,370$. Pengaruh antara kemampuan sumber daya manusia dengan pelaksanaan otonomi daerah adalah semakin baik kemampuan sumber daya manusia maka pelaksanaan otonomi daerah akan semakin baik. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian yang sebelumnya yang dilakukan oleh Vebri (2009) tentang pengaruh kemampuan aparatur pemerintah daerah terhadap pelaksanaan otonomi daerah dimana kemampuan aparatur pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila manusia pelaksananya baik, dalam arti mentalitas maupun kapasitasnya (Josep:2005). Pentingnya posisi manusia pelaksana ini karena manusia merupakan unsur dinamis dalam organisasi bertindak/berfungsi sebagai subjek penggerak roda organisasi pemerintah. Oleh sebab itu, kemampuan sumber daya manusia yang kurang memadai dengan sendirinya melahirkan implikasi yang kurang menguntungkan bagi peyelenggaraan otonomi daerah.

Salah satu atribut yang memadai suatu Daerah Otonom adalah dimilikinya aparatur pemerintah tersendiri yang terpisah dari aparatur Pemerintah Pusat yang mampu menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangganya sendiri. Pemerintah harus menetapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk dapat melayani publik sehingga dapat tercapainya tujuan pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan kemampuan daerah dari segi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan daerah untuk membiayai

pelaksanaan kekuasaan/ kewenangan yang dimiliki daerah yang tercermin dari jumlah pendapatan asli daerah.

Pada pemerintah telah menenpatkan sumber daya manusia yang berkualitas maka akan tercapainya pelaksanaan otonomi daerah, karena manusia pelaksana merupakan faktor esensial dalam penyelenggaraan pemerintah dan manusia merupakan subjek dalam aktivitas pemerintah. dari semua pernyataan menyatakan bahwa kemampuan sumber daya manusia yang baik akan berpengaruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Dengan keadaan yang terjadi saat ini dimana kemampuan sumber daya manusia di pemerintahan dikategorikan baik tapi masih adanya kelemahan. sehingga, membawa pengaruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian “Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Kemampuan Sumber Daya Manusia Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut:

1. penerapan *good governance* berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan otonomi daerah pada Pemerintah Kota Padang. Dimana semakin baik penerapan *good governance* semakin baik pula pelaksanaan otonomi daerah (H_1) diterima.
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan otonomi daerah Kota Padang. Dimana semakin baik kemampuan sumber daya manusia maka semakin baik pula pelaksanaan otonomi daerah (H_2 diterima).

Keterbatasan

Meskipun peneliti telah merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kuesioner dalam penelitian ini dikembangkan sendiri tanpa merujuk pada kuesioner penelitian terdahulu, sehingga akan berpengaruh tingkat keterungkapan masalah penelitian.
2. Penelitian ini merupakan metode survey mengutamakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. sebaiknya dalam mengumpulkan data dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.

Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penelitian menyatakan bahwa :

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa penerapan *good governance* dan kemampuan sumber daya manusia telah dilakukan dengan baik, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada pelaksanaan otonomi daerah yang belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik oleh pemerintah. Pemerintah sebaiknya melakukan pengajian ulang mengenai prinsip-prinsip *good governance* dan kemampuan sumber daya manusia agar pelaksanaan otonomi dapat terlaksana dengan baik.
2. Penelitian ini masih terbatas pada penerapan *good governance* dan kemampuan sumber daya manusia terhadap pelaksanaan otonomi daerah, untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang dihadapi pemerintah.
3. Pemerintah daerah selaku penyelenggara daerah harus mampu melaksanakan otonomi dan mengelola rumah tangga daerah secara baik. Pemerintah dapat menjadikan otonomi daerah sebagai momentum dalam memajukan daerah, mengelola kekayaan daerah, lebih giat mengkaji dan menggali berbagai potensi perpajakan daerah yang ada untuk dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan dan tentu saja meningkatkan pendapatan asli

daerah agar daerah dapat lebih mandiri dalam pembiayaan program pembangunan daerah.

4. peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, sebaiknya melakukan perluasan sampel penelitian atau peneliti dapat mengadakan penelitian diluar Kota Padang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Yani. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- _____. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, Damodar. 1999. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Josep Riwo Kaho, 1991, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Rajawali Press. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mudrajat Kuncoro. 2004. *Otonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Modul *Good Governance*. 2006. "Akuntabilitas dan Good Governance". Jakarta. Melalui www.google.com(30/2/2013)
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- _____. 2004. *Otonomi Daerah Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Miyasto, *Desentralisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance, dalam Pemulihan Ekonomi dan Otonomi Daerah*, LASPI, Jakarta, 2001.
- Raskiano, Aswin. 2010. Kemampuan keuangan daerah terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Melalui www.kabarindonesia.com [30/01/2013]
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Susanto, voni 2010. Pengaruh pelaksanaan otonomi daerah dan optimalisasi pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli kota padang. Studi empiris pada SKPD Kota Padang. . *Skripsi*. Padang. FE UNP
- Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Ujang, Bahar. 2009. *Otonomi Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri*. Jakarta: PT. Indeks.
- Undang-Undang RI No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
- Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 Dan Juklak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yuliandra, Betri. 2012. Pengaruh penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah dan komitmen aparat terhadap kinerja pemerintah daerah. Studi empiris pada SKPD Kota Padang. . *Skripsi*. Padang. FE UNP

